



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TASIKMALAYA

TAHUN 2023

DINAS PERHUBUNGAN

Pemerintah Kota Tasikmalaya
Jl.Ir.H. Djuanda No. 191 Tlp. (0265) 325187 - 342428
Fax. (0265) 325187
TASIKMALAYA



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan, Kota Tasikmalaya Tahun 2023 dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya pada Tahun 2023.

Penyusunan LKIP ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun maksud dari penyusunan LKIP ini adalah untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah di tetapkan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan tujuan meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Kami mohon maaf apabila dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan demi perbaikan pada tahun selanjutnya. Disamping itu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Laporan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.v

Tasikmalaya, 26 Januari 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TASIKMALAYA**

**Drs. H. ASEP MAMAN PERMANA, M.S,i
NIP. 19660916 1988031 004**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan.....	3
1.3 Tugas dan Fungsi.....	5
1.4 Isu Strategis.....	6
1.5 Landasan Hukum.....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis.....	9
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	13
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	16
2.4 Rencana Kinerja Tahun 2023.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	23
3.1.1 Sasaran Strategis I.....	24
3.1.2 Sasaran Strategis II.....	26
3.1.3 Sasaran Strategis III.....	29
3.2 Capaian Penyerapan APBD.....	30
BAB IV PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi perangkat daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan di bidang perhubungan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan dengan mempertimbangkan visi dan misi daerah, keselarasan dengan tujuan dan

sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
 1. Seksi Fasilitas Lalu Lintas;
 2. Seksi Keselamatan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Angkutan, membawahkan :
 1. Seksi Bina Usaha Angkutan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. UPTD.

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana Operasional;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Terdapat kelompok jabatan fungsional lain selain yang telah disebutkan di atas, adalah Kelompok Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor yang berada di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

1.3 Tugas dan Fungsi

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

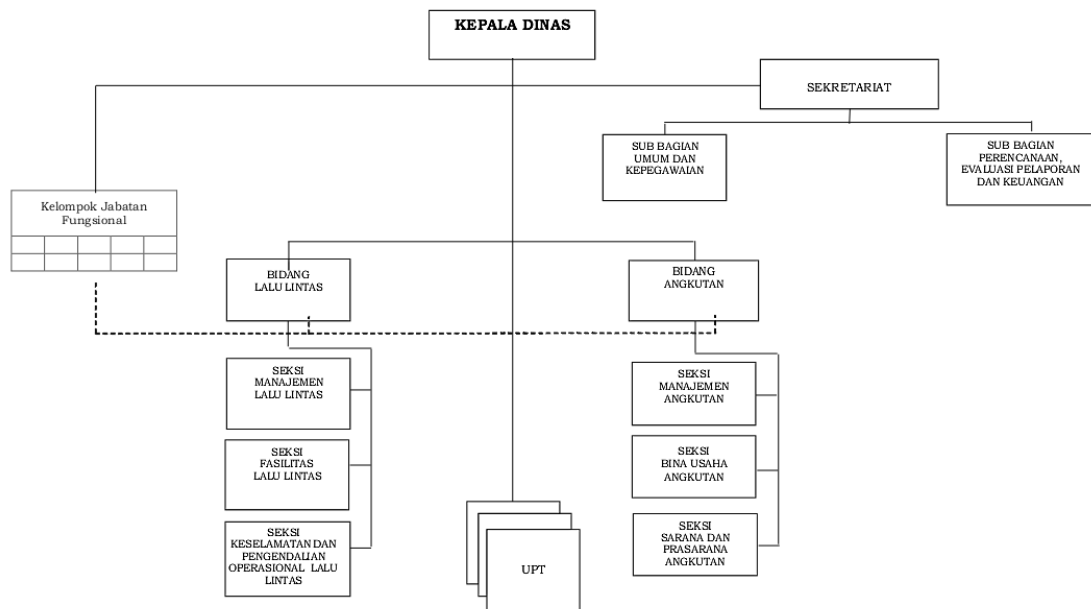
Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Sebagaimana Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja Dinas dalam pengelolaan urusan perhubungan., dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja dinas;
- b. merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan program kerja dinas untuk mendukung visi dan misi daerah;
- c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan lalu lintas;
- d. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang angkutan jalan;
- e. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dinas;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit organisasi dinas;
- h. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau Unit Kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan di bidang perhubungan;

- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepala dinas dibantu oleh pejabat structural, jabatan fungsional sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :

Table 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



1.4 Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, isu strategis adalah kondisi/ hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/ hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Berdasarkan faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, jika ditinjau dari aspek: gambaran pelayanan prangkat daerah, sasaran jangka menengah daerah, implikasi RTRW, implikasi KLHS, maka identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi masih kurangnya perlengkapan jalan dan masih kurangnya prasarana angkutan shelter dan pembangunan serta pengembangan terminal tipe c.
2. Masih adanya ruas jalan yang digunakan selaian untuk kepentingan lalu lintas yang dapat menimbulkan kemacetan khususnya di pusat kota;
3. Masih adanya trayek angkutan kota yang tumpang tindih;
4. Masih kurangnya koordinasi dan sinergitas antara pemerintah propinsi dengan kabupaten/kota terkait pengawasan. pengendalian angkutan yang melintasi wilayah Kota Tasikmalaya antara lain dengan adanya program over dimensi over load (ODOL) kendaraan dari pemerintah pusat.
5. Kurang optimalnya jumlah dan pengelolaan terminal tipe c;

6. Masih lambatnya penanganan kebutuhan dan/atau pengaduan masyarakat terhadap perlengkapan jalan, diantaranya belum tersedianya data induk perlengkapan jalan.
7. Banyaknya penerangan jalan umum yang masih menggunakan jenis lampu bohlam sodium, penggantian bohlam ke jenis led relative lambat/terbatas tiap tahunnya sehingga dampak dari penurunan daya menjadi terlambat. Sehingga efisiensi pembayaran listrik ke PLN menjadi kurang optimal.
8. Masih lemahnya penanganan pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan perhubungan. Hal ini terkait dengan keterbatasan anggaran untuk memenuhi pengaduan masyarakat khususnya pada pelayanan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum.
9. Manajemen penanganan informasi perhubungan masih belum optimal, hal ini terkait SOP pelaksanaan penanganan informasi perhubungan bagi masyarakat luas.
10. Adanya keterbatasan kewenangan terkait penanganan uji emisi kendaraan bermotor, hal ini hanya dilakukan terhadap kendaraan angkutan orang dan barang.

Konsekuensi logis dengan adanya perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, propinsi dan kota menjadikan adanya isu strategis di bidang perhubungan, sebagai

berikut :

1. Kesenjangan yang semakin besar antara perkembangan aktivitas masyarakat Kota Tasikmalaya dengan kebutuhan perlengkapan jalan dan sarana parasarana angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan;
2. Belum optimalnya manajemen rekayasa lalu lintas, manajemen angkutan dan pengendalian lalu lintas.

1.5 Landasan Hukum

LKIP Kota Tasikmalaya ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Tahun 2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 050/710/Sekretariat, tanggal 29 Juni 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022, dimana dalam perjalanannya mengalami perubahan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 050/22/Sekretariat, tanggal 27 Nopember 2020 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2023 – 2026. Dan setahun kemudian direviu yang ditetapkan dengan SK. Kepala Dinas Nomor: 050/22/Sekretariat, tanggal 16 November 2021 tentang Penetapan Reviu. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dilakukan kembali mengingat Intruksi Mentri Dalam Negri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Masa JAbatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan Surat

Edaran Walikota Tasikmalaya No : 050/0497/Bapelitbandfa tanggal 11 Januari 2022 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Konsekuensi logis masa berusia 4 (empat) tahun.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi "Dengan Iman dan Takwa Kota Tasikmalaya menjadi Pusat Perdagangan dan Industri Maju di Jawa Barat" dan misi, tujuan dan sasaran daerah sebagai berikut :

Table 2.1

Misi, Tujuan dan sasaran RPJMD

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
T4	Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan	T1	Terwujudnya lalu lintas dan angkutan jalan yang Berkeselamatan untuk mendukung indeks kemantapan jalan
S9	Meningkatnya layanan infratraktur kota yang berkualitas	S1	Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan
P9	Program Peningkatan layanan infratrakturkota yang berkualitas	P1	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
T5	Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi	T2	Terwujudnya implementasirepormasi birokrasi
S11	Meningkatnya kualitas layanan publik, akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan keuangan daerah yang inovatif berbasis teknologi informasi	S2.1	Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi
		S2.2	Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan
P11	Program Peningkatan kualitas layanan	P2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Selanjutnya, Renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya tersebut dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Adapun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya untuk menunjang terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah adalah sebagaimana tabel dibawah.

Table 2.2
Tujuan, Sasaran, dan Program Tujuan Daerah 2023-2026

Tujuan Daerah (T4)	Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan		
Sasaran Daerah (s9)	Meningkatnya layanan infratraktur kota yang berkualitas		
Program Daerah (P9)	Peningkatan layanan infratraktur kota yang berkualitas		
Tujuan	sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan untuk mendukung indeks kemantapan jalan	Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan	Meningkatkan jumlah ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Meningkatkan perlengkapan jalan dan sarana prasarana angkutan umum pada ruas jalan kota melalui pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan, manajemen rekayasa dan pembinaan keselamatan
Tujuan Daerah (T5)	Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi		

Sasaran Daerah (S11)	Meningkatnya kualitas layanan publik, akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan keuangan daerah yang inovatif berbasis teknologi informasi		
Program Daerah(P11)	Peningkatan kualitas layanan publik, akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan keuangan daerah yang inovatif berbasis teknologi informasi		
Tujuan	sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi	Meningkatnya kualitas layanan publik, akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan keuangan daerah yang inovatif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan layanan publik yang profesional, Inovatif, dan memuaskan berbasis teknologi informasi yang dilaksanakan melalui program tasik layanan prima	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur, penguatan kelembagaan serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai; 2. Percepatan penyerapan sistem dan teknologi informasi pada semua layanan publik, serta peningkatan keterbukaan informasi
		Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan	1. Peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif, penganggaran dan penatausahaan keuangan dan aset daerah yang

Sesuai dengan strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, maka ditetapkan target kinerja seperti pada tabel di bawah.

Table 2.3

Tujuan, Sasaran, Indikator dan target kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN			
				2023	2024	2025	2026

1	Persentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan	Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan	Presentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan	67,23	68,62	70,27	72,16
2	Hasil Survey IKM	Meningkatnya kualitas layanan publik, akuntabilitas kinerja, dan	Capaian IKM Perangkat Daerah	79,00 (B)	79,50 (B)	80,00 (B)	80,50 (B)
3	Nilai Evaluasi SAKIP	pengelolaan keuangan daerah yang inovatif berbasis	Hasil Penilaian SAKIP perangkat daerah	82,60 (A)	82,65 (A)	82,68 (A)	82,75 (A)

2.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing perangkat daerah.

Pada masa laporan ini, Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Table 2.4
Indikator Kinerja Utama 2023

No	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Akhir Kinerja periode 2023	Target 2023
1	Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan	Persentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan	Rata-rata persentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan	%	62,37	67,23
2	Meningkatnya kualitas layanan publik, akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan keuangan daerah yang inovatif	Capaian IKM Perangkat Daerah	Hasil Survey IKM	Nilai	79,11 (B)	79,00 (B)
	berbasis teknologi informasi	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori	70,21 (BB)	82.60 (A)

Dinas Perhubungan kota tasikmalaya untuk Capaian nilai indikator Persentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan mendapatkan nilai 62,37 % dari target yang sudah ditentukan 67, 23 %. Faktor tidak tercapainya target tersebut yaitu :

1. Diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Yang salah satu pasalnya bahwa akan dihapusnya retribusi pengujian kendaraan bermotor, ini bisa dibuktikan mulai bulan

September Tahun 2023 pelayanan uji kendaraan bermotor semakin berkurang sampai bulan Desember 2023.

2. Kurangnya pengawasan dilapangan terhadap kendaraan angkutan barang dan angkutan orang yang tidak melakukan uji, sehingga mereka tidak sadar untuk melaksanakan uji kendaraan bermotor.

Untuk capaian nilai saki perangkat daerah Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya mendapatkan bobot 70,21 (BB) dari target 82,60 (A), sehingga nilai tersebut tidak mencapai target yang sudah ditentukan , Faktor tidak tercapainya target tersebut adalah kurangnya Sumber Daya Manusia Pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.

Untuk capaian nilai IKM pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya mendapatkan nilai 79,11 (B) dari target yang sudah ditentukan yaitu 79,00 (B) ,nilai tersebut sudah mencapai target yang ditentukan.

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya tersebut, diuraikan menjadi Indek Kinerja Utama eselon II dan III sebagai berikut :

Table 2.5

Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang

Pelaksana	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi	Tahun	Target	Perhitungan
Kepala Dinas, Kepala Bidang	Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan	%	Rata-rata persentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan	2023	67,23	$(57,14\%+77,32\%)/2$

Kepala Dinas , Sekretaris	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai (kategori)	Nilai Hasil Survey IKM	2023	79,00 (B)	SKM = (Total dari Nilai Persepsi Per Unsur / Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang
	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai (Kategori)	Nilai Sakip	2023	82,60 (A)	Total Bobot Perencanaan Kinerja , Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi yang berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien dalam bersinergi dengan pencapaian visi dan misi daerah.

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2023, sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya yang termaktub dalam dokumen Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2023 – 2026. Dengan memperhatikan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

Perjanjian Kinerja untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Table 2.6

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya 2023

No	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Akhir Kinerja periode 2023	Target 2023
1	Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan	Persentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan	Rata-rata persentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan	%	62,37	67,23
2	Meningkatnya kualitas layanan publik, akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan keuangan daerah yang inovatif berbasis teknologi informasi	Capaian IKM Perangkat Daerah	Hasil Survey IKM	Nilai	79,11 (B)	79,00 (B)
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori	70,21 (BB)	82.60 (A)

2.4 Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, RPJMD dan Rancangan Awal RKPD serta memperhatikan Rancangan Awal RKPD Provinsi dan Rancangan Awal RKP.

Yang dimaksud dengan rencana kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi dalam RPJMD.

Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
	Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								37,915,742,850
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								130,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,60 (A) Nilai/Kate	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat gori Daerah	3 dokumen	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100 %		80,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,60 (A) Nilai/Kate	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi gori Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Persentase capaian administrasi keuangan	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,60 (A) Nilai/Kate	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan gori Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	n n1 Laporan n	Persentase capaian administrasi keuangan	100 %		10,000,000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,60 (A) Nilai/Kate	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran gloumri lah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen 1 Dokumen	Persentase capaian administrasi keuangan	100 %		5,000,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								47,500,000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tercapainya SAKIP Perangkat Daerah	82,60 (A) Nilai/Kate	Jumlah Rencana Kebutuhan gboairrang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	Persentase capaian administrasi barang milik daerah	100 %		7,500,000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tercapainya SAKIP Perangkat Daerah	82,60 (A) Nilai/Kate	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik gori Daerah SKPD	1 dokumen	Persentase capaian administrasi barang milik daerah	100 %		25,000,000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tercapainya SAKIP Perangkat Daerah	82,60 (A) Nilai/Kate	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan gboairrang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Persentase capaian administrasi barang milik daerah	100 %		5,000,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tercapainya SAKIP Perangkat Daerah	82,60 (A) Nilai/Kate	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik gori Daerah pada SKPD	2 Laporan	Persentase capaian administrasi barang milik daerah	100 %		10,000,000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								14,500,000
1.01.0000 Dinas Perhubungan								
.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan								
Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
	Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target		
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tercapainya SAKIP Perangkat Daerah	82,60 (A) Nilai/Kate	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi gori Daerah	1 Dokumen	Persentase capaian administrasi pendapatan	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,000,000
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tercapainya SAKIP Perangkat Daerah	82,60 (A) Nilai/Kate	Jumlah Laporan Pengelolaan gboeritribusi Daerah	1 laporan	Persentase capaian administrasi pendapatan	100 %		7,500,000

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								48,270,000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tercapainya SAKIP Perangkat Daerah	82,60 (A) Nilai/Kate	Jumlah Paket Pakaian Dinas gboeriserta Atribut Kelengkapan	400 paket	Persentase capaian administrasi kepegawaian	100 %		38,270,000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tercapainya SAKIP Perangkat Daerah	82,60 (A) Nilai/Kate	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan gori	1 Dokumen	Persentase capaian administrasi kepegawaian	100 %		5,000,000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tercapainya SAKIP Perangkat Daerah	82,60 (A) Nilai/Kate	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan gori Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	Persentase capaian administrasi kepegawaian	100 %		5,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah								530,543,900
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tercapainya IKM Perangkat Daerah	79 (B) Nilai/Kate	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan gofrangrungan Kantor yang Disediakan	10 Unit	Persentase capaian administrasi umum	100 %		5,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercapainya IKM Perangkat Daerah	79 (B) Nilai/Kate	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang gori Disediakan	1 paket	Persentase capaian administrasi umum	100 %		37,500,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tercapainya IKM Perangkat Daerah	79 (B) Nilai/Kate	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang gori	10 paket	Persentase capaian administrasi umum	100 %		2,500,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tercapainya IKM Perangkat Daerah	79 (B) Nilai/Kate	Jumlah Paket Bahan Logistik goKrainitor yang Disediakan	5 paket	Persentase capaian administrasi umum	100 %		29,999,500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercapainya IKM Perangkat Daerah	79 (B) Nilai/Kate	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan gori yang Disediakan	2 paket	Persentase capaian administrasi umum	100 %		53,063,400
01.0000 Dinas Perhubungan								
0.00.01.0000 Dinas Perhubungan								
Program/ Kegiatan	Sasaran Program Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target	Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tercapainya IKM Perangkat Daerah	79 (B) Nilai/Kate	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan goPreinundang-Undangan yang Disediakan	1728 Dokum	Persentase capaian en administrasi umum	100 %		35,000,000
Penyediaan Bahan/Material	Tercapainya IKM Perangkat Daerah	79 (B) Nilai/Kate	Jumlah Paket Bahan/Material goyaring Disediakan	5 paket	Persentase capaian administrasi umum	100 %		25,000,000
Fasilitasi Kurjungan Tamu	Tercapainya IKM Perangkat Daerah	79 (B) Nilai/Kate	Jumlah Laporan Fasilitasi goKrujungan Tamu	8 Laporan	Persentase capaian administrasi umum	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapainya IKM Perangkat Daerah	79 (B) Nilai/Kate	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat goKroirdinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	Persentase capaian administrasi umum	100 %		299,981,000
Penatausahaan Ansp Dinamis pada SKPD	Tercapainya IKM Perangkat Daerah	79 (B) Nilai/Kate	Jumlah Dokumen Penatausahaan Ansp gori Dinamis pada SKPD	50 dokumen	Persentase capaian administrasi umum	100 %		5,000,000

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tercapainya IKM Perangkat Daerah	79 (B) Nilai/Kate	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem goPemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	Persentase capaian administrasi umum	100 %		7,500,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								79,550,000
Pengadaan Mebel	Tercapainya IKM Perangkat Daerah	79 (B) Nilai/Kate	Jumlah Paket Mebel yang goDisediakan	2 paket	Persentase capaian pengadaan barang milik daerah	100 %		79,550,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								26,419,418,800
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya IKM Perangkat Daerah	79 (B) Nilai/Kate	Jumlah Laporan Penyediaan golansi a Surat Menyurat	40 Laporan	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang	100 %		2,700,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercapainya IKM Perangkat Daerah	79 (B) Nilai/Kate	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber goDnya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang	100 %		26,000,000,000
01.0000 Dinas Perhubungan								
0.00.01.0000 Dinas Perhubungan								
Program/ Kegiatan	Sasaran Program Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target	Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercapainya IKM Perangkat Daerah	79 (B) Nilai/Kate	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan goPreilengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang	100 %		24,950,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya IKM Perangkat Daerah	79 (B) Nilai/Kate	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum gori	4 Laporan	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang	100 %		391,768,800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								627,230,250
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tercapainya IKM Perangkat Daerah	79 (B) Nilai/Kate	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan gori yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 unit	Persentase capaian pemeliharaan barang	100 %		105,674,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tercapainya IKM Perangkat Daerah	79 (B) Nilai/Kate	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan gori dibayarkan Pajak dan	31 unit	Persentase capaian pemeliharaan barang	100 %		219,400,000
Pemeliharaan Mebel	Tercapainya IKM Perangkat Daerah	79 (B) Nilai/Kate	Jumlah Mebel yang goDipelihara	5 Unit	Persentase capaian pemeliharaan barang	100 %		10,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tercapainya IKM Perangkat Daerah	79 (B) Nilai/Kate	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang gori	1 unit	Persentase capaian pemeliharaan barang	100 %		277,306,250
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tercapainya IKM Perangkat Daerah	79 (B) Nilai/Kate	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor goatral a Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Persentase capaian pemeliharaan barang	100 %		5,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tercapainya IKM Perangkat Daerah	79 (B) Nilai/Kate	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau gori Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Persentase capaian pemeliharaan barang	100 %		9,850,000

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							9,332,539,600
Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							8,562,093,600
Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase layanan lalu lintas berkeselamatan	57,14 %	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	400 unit	Persentase capaian pengadaan prasarana jalan	100 %	7,418,050,000
1.01.0000 Dinas Perhubungan							
1.00.01.0000 Dinas Perhubungan							
Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Persentase layanan lalu lintas berkeselamatan	57,14 %	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit	Persentase capaian pengadaan prasarana jalan	100 %	19,966,000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Persentase layanan lalu lintas berkeselamatan	57,14 %	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	95 Unit	Persentase capaian pengadaan prasarana jalan	100 %	1,124,077,600
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							515,450,000
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase layanan lalu lintas berkeselamatan	57,14 %	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Persentase capaian manajemen rekayasa lalu lintas	100 %	20,000,000
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Persentase layanan lalu lintas berkeselamatan	57,14 %	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	18 unit	Persentase capaian manajemen rekayasa lalu lintas	100 %	95,000,000
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase layanan lalu lintas berkeselamatan	57,14 %	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 laporan	Persentase capaian manajemen rekayasa lalu lintas	100 %	380,450,000
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase layanan lalu lintas berkeselamatan	57,14 %	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6 laporan	Persentase capaian manajemen rekayasa lalu lintas	100 %	20,000,000
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota							15,000,000
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Persentase layanan lalu lintas berkeselamatan	57,14 %	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang ditetapkan	5 dokumen	Persentase capaian analisis dampak lalu lintas	100 %	5,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Persentase layanan lalu lintas berkeselamatan	57,14 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	10 kali	Persentase capaian analisis dampak lalu lintas	100 %	5,000,000
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Persentase layanan lalu lintas berkeselamatan	57,14 %	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	10 kali 0 Laporan	Persentase capaian analisis dampak lalu lintas	100 %	5,000,000
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							239,996,000
1.01.0000 Dinas Perhubungan							
1.00.01.0000 Dinas Perhubungan							
Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan angkutan berkeselamatan	77,32 %	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit	Persentase capaian penyediaan angkutan umum orang/barang	100 %	219,996,000
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan angkutan berkeselamatan	77,32 %	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	Persentase capaian penyediaan angkutan umum orang/barang	100 %	20,000,000
TOTAL							47,248,282,450
1.01.0000 Dinas Perhubungan							
1.00.01.0001 UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor							
Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							100,000,000
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							100,000,000
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase layanan angkutan berkeselamatan	77,32 %	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2000 Dokume	Persentase capaian pengujian kendaraan bermotor	100 %	50,000,000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase layanan angkutan berkeselamatan	77,32 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2 Unit	Persentase capaian pengujian kendaraan bermotor	100 %	40,000,000
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase layanan angkutan berkeselamatan	77,32 %	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan	Persentase capaian pengujian kendaraan bermotor	100 %	10,000,000
TOTAL							100,000,000
1.01.0000 Dinas Perhubungan							
1.00.01.0002 UPTD Pengelolaan Terminal							
Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							2,349,823,450
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C							2,349,823,450
Membangunan Gedung Terminal	Persentase layanan angkutan berkeselamatan	77,32 %	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1 Unit	Persentase capaian pengelolaan terminal type C	100 %	2,100,000,000
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Persentase layanan angkutan berkeselamatan	77,32 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	1 Unit	Persentase capaian pengelolaan terminal type C	100 %	15,165,500
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Persentase layanan angkutan berkeselamatan	77,32 %	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Orang	Persentase capaian pengelolaan terminal type C	100 %	234,657,950
TOTAL							2,349,823,450

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							445,624,000
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir							445,624,000
Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase layanan lalu lintas berkeselamatan	57,14 %	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Persentase capaian penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	100 %	10,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase layanan lalu lintas berkeselamatan	57,14 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	Persentase capaian penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	100 %	435,624,000
TOTAL							445,624,000

Rencana Kerja tahun 2023 memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat 2 (dua) program yaitu program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang merupakan program urusan perhubungan non pelayanan dasar, dengan jumlah 14 kegiatan dan 33 Sub kegiatan dan program penunjang pemerintahan daerah, dengan jumlah 14 kegiatan dan 33 sub kegiatan Dalam upaya mensinergikan pencapaian tujuan dan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, dilakukan identifikasi indikator terhadap tujuan dan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan anggaran keseluruhan berjumlah **Rp. 65.321.225.750,00** Kebijakan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam upaya mewujudkan jalan yang berkeselamatan, selaras dengan sasaran renstra yang akan dicapai.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran perangkat daerah kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban melaksanakan program dan kegiatan bidang perhubungan yang selaras dengan tujuan dan sasaran daerah melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi daerah.

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap perangkat daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan perangkat daerah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari perangkat daerah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari perangkat daerah yang bersangkutan.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Table 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama 2023

No	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Akhir Kinerja periode 2023	Target 2023
1	Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan	Persentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan	Rata-rata persentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan	%	62,37	67,23

2	Meningkatnya kualitas layanan publik, akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan keuangan daerah yang inovatif	Capaian IKM Perangkat Daerah	Hasil Survey IKM	Nilai	79,11 (B)	79,00 (B)
	berbasis teknologi informasi	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori	70,21 (BB)	82.60 (A)

3.1.1 Sasaran Strategis I

Gambar 3.1

Persentase Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Berkeselamatan



Layanan Lalu Lintas dan angkutan yang berkeselamatan mengalami peningkatan pada Capain 2023 sebesar 92,77% sedangkan

pada tahun 2022 adalah 91,80% dengan target sebesar 67,23 tetapi tidak terealisasi yaitu 62,37 poin. Dari segi realisasi, capaian persentase tahun 2023 menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 2,3 poin dengan nilai tahun 2022 sebesar 64,67 sedangkan tahun 2023 sebesar 62,37. Pada aspek capaian kinerja, penurunan sebesar 0,98% dengan capaian kinerja tahun 2022 adalah sebesar 91,80% dan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 92,77%.

Dalam Konteks perencanaan empat tahunan, realisasi layanan sebesar 62,37 pada tahun ketiga sudah melebihi harapan yaitu hampir mencapai target akhir RPJMD sebesar 86,43 dengan target akhir RPJMD sebesar 72,16. Capaian pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya di tingkat Nasional lebih rendah 1,63 dibandingkan rata rata nasional sebesar 64,00 sedangkan capaian Kota Tasikmalaya sebesar 62,37.

Akar Permasalahan Target sasaran yang tidak tercapai dan Upaya Peningkatan Layanan Lalu Lintas yang Berkeselamatan.

Berdasarkan Undang Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintah Daerah, yang salah satu pasalnya bahwa akan dihapusnya retribusi pengujian kendaraan bermotor bisa dibuktikan mulai bulan september Tahun 2023 pelayanan uji kendaraan bermotor semakin berkurang sampai bulan Desember 2023

Hal yang membuat tidak tercapainya target yaitu kesadaran pengguna ataupun hak milik kendaraan yang tidak melakukan uji kendaraan secara berkala yang mengakibatkan menurunnya angka keselamatan bagi pengemudi dan kendaraan lain. Kurangnya pengawasan angkutan barang juga menjadi salah satu alasan masyarakat tidak melakukan layak uji kendaraan, padahal hal itu sangat penting.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah Meningkatkan kualitas dan kuantitas adalah :

1. Peningkatan sarana dan prasarana Angkutan umum dan barang dalam mendukung aksesibilitas dan aktifitas pergerakan masyarakat.
2. Meningkatkan keselamatan, Ketertiban, Kelancaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Pengadaan program Kebijakan Strategis di Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.
4. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk perizinan dan rekomendasi.
5. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan tata tertib berlalu lintas dan melaksanakan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan.

3.1.2 Sasaran Strategis II

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. Suvei IKM ini menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Nomor 16 Tahun 2014.

Hasil survei IKM Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya ini menunjukkan katagori yang baik dengan nilai indeks setelah di konversi sebesar 79,11 (B), target yang ditentukan di tahun 2023 adalah sebesar 79,00 (B), sehingga tercapai. Namun untuk perbandingan dengan realisasi Kota Tasikmalaya dengan Dinas Perhubungan berbeda Dimana nilai resalisasi Kota Sebesar 87,14 sehingga jika melakukan perbandingan dengan Kota tidak tercapai. Berikut merupakan Hasil Perhitungan Data Capaian IKM Tahun 2023.

Gambar 3.2

Persentase Capaian IKM Perangkat Daerah



Capain Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Tahun 2023 sebesar 100,14% sedangkan pada tahun 2022 adalah 100,04% dengan target sebesar 79,00 terealisasi yaitu 79,11 poin. Dari segi realisasi, capaian persentase tahun 2023 naik dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 0,08 poin dengan nilai tahun 2022 sebesar 79,03 sedangkan tahun 2023 sebesar 79,11. Pada aspek capaian kinerja, penurunan sebesar 0,10% dengan capaian kinerja tahun 2022 adalah sebesar 100,04% dan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100,14%.

Dalam Konteks perencanaan empat tahunan, realisasi IKM sebesar 79,11 pada tahun ketiga sudah melebihi harapan yaitu hampir mencapai target akhir RPJMD sebesar 95,60 dengan target akhir RPJMD sebesar 82,75. Capaian IKM Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya di tingkat Nasional lebih tinggi 8,03 dibandingkan rata rata nasional sebesar 87,14 sedangkan capaian Kota Tasikmalaya lebih kecil yaitu sebesar 79,11.

3.1.3 Sasaran Strategis III

Penerapan Sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang efektif, menunjukkan bahwa usaha pemerintah dalam mewujudkan good governance berjalan dengan baik. Good governance ditandai dengan meningkatnya akuntabilitas kinerja, transparansi atas penyerapan anggaran dan laporan program serta kegiatan pemerintah.

Gambar 3.3
Persentase Capaian SAKIP Perangkat Daerah



Capain Sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Tahun 2023 sebesar 85.00% sedangkan pada tahun 2022 adalah 99,23% dengan target sebesar 82,60 tidak terealisasi yaitu 70,21 poin. Dari segi realisasi, capaian persentase tahun 2023 turun dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebanyak -11,9 poin dengan nilai tahun 2022 sebesar 82,11 sedangkan tahun 2023 sebesar 70,21. Pada aspek capaian kinerja, penurunan sebesar -14,23% dengan capaian kinerja tahun 2022 adalah sebesar 99,23% dan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 85,00%.

Dalam Konteks perencanaan empat tahunan, realisasi SAKIP sebesar 70,21 pada tahun ketiga sudah melebihi harapan yaitu hampir mencapai target akhir

RPJMD sebesar 87,22 dengan target akhir RPJMD sebesar 80,5. Capaian IKM Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya di tingkat Kota lebih rendah 1,62 dibandingkan rata-rata Kota sebesar 71,83 sedangkan capaian Kota Tasikmalaya sebesar 70,21.

Akar Permasalahan Target sasaran yang tidak tercapai dan Upaya Peningkatan Capaian SAKIP Perangkat Daerah .

Berdasarkan dari Laporan Hasil Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya ada beberapa kendala yang membuat sasaran tidak tercapai ada beberapa indikator penilaian.

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Keberadaan rencana Kerja dan perjanjian kinerja belum dapat di evaluasi penilaiannya.
- 2) Kualitas belum memenuhi Standar
- 3) Pemanfaatan dan Pemantauan rencana aksi belum di susun, rekomendasi hasil evaluasi belum di tindak lanjut.

b. Pengukuran Kinerja

Keberadaan, kualitas dan pemanfaatan belum melakukan penyesuaian strategis dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

c. Laporan Kinerja

Keberadaan, kualitas, pemanfaatan belum di publikasi tepat waktu dan data kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi budaya kinerja organisasi.

d. Evaluasi Kinerja

Keberadaan, Kualitas, dan pemanfaatan belum sepenuhnya melakukan evaluasi akuntabilitas belum efisien.

Hal yang membuat tidak tercapainya target, namun ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk Meningkatkan kualitas dan kuantitas adalah :

1. Melengkapi dokumen Perencanaan Kinerja dan perjanjian kinerja
2. Pemisahan indikator tujuan dan sasaran
3. Pemantauan rencana aksi kinerja secara berkala
4. Membuat hasil perhitungan data kinerja sesuai formulasi kinerja
5. Penyusunan laporan capaian fisik dan anggaran secara berkala
6. Membuat lembaran Reviu

3.2 Capaian Penyerapan APBD

Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya adalah salah satu dinas yang mengelola pendapatan dari retribusi dan belanja. Dapat digambarkan pengelolaan APBD tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Table 3.2
Retribusi 2023

NO	NAMA RETRIBUSI	TARGET	REALISASI	%	LEBIH / (KURANG) %
1	PARKIR	2.000.006.000	1.603.614.000	80,18	19,82
2	P K B	2.017.090.000	2.008.045.000	99,55	0,45
3	TERMINAL	404.055.000	365.100.000	90,36	9,64
4	TRAYEK	105.225.000	51.004.500	48,47	51,53
JUMLAH		4.526.376.000	4.027.763.500	88,98	11,02

Pada tahun 2022 terjadi pandemi covid-19, hal tersebut masih berdampak terhadap perekonomian yang belum stabil sehingga berdampak pada pendapatan Masyarakat, tidak hanya itu saja, ada aturan baru yaitu UUD No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berpengaruh pada Retribusi kendaraan bermotor, Terminal dan retribusi izin trayek.

Selanjutnya dalam pengelolaan belanja, dapat disampaikan sebagai berikut :

Table 3.3
Program Anggaran Realisasi 2023

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.528.205.450	43.255.467.809	99,30
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	21.793.020.300	21.703.330.503	99,59
Jumlah		65.321.225.750	64.958.798.312	99,40

Anggaran belanja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya secara keseluruhan berjumlah Rp. 65.321.225.750,- dengan rincian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 43.528.205.450,- dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Rp. 21.793.020.300,-. Realisasi keseluruhan untuk belanja yaitu Rp. 64.958.798.312,-. Porsi belanja paling besar ada pada belanja barang dan jasa, hal ini dengan adanya pembayaran listrik penerangan jalan umum se-wilayah Kota Tasikmalaya yang mencapai realisasi sebesar Rp. 32.675.220,015,- dari pagu anggaran Rp. 32.692.511.000.

Table 3.4
Program Kegiatan Anggaran

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH	REALISASI KEUANGAN		REALISASI	SISA
		Rp	%	FISIK %	ANGGARAN
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	65.321.225.750	64.958.798.312	99,40	100,00	362.427.438
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	43.528.205.450	43.255.467.809	99,30	100,00	272.737.641
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104.560.000	102.845.926	98,36	100,00	1.714.074
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.560.000	82.845.926	97,97	100,00	1.714.074
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.371.830.750	9.152.029.538	97,65	100,00	219.801.212
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.356.830.750	9.137.029.538	97,65	100,00	219.801.212
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.500.000	7.500.000	100,00	100,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.500.000	7.500.000	100,00	100,00	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37.500.000	36.943.300	98,52	100,00	556.700
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.500.000	7.500.000	100,00	100,00	-
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25.000.000	24.483.300	97,93	100,00	516.700
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	4.960.000	99,20	100,00	40.000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5.000.000	4.992.500	99,85	100,00	7.500
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5.000.000	4.992.500	99,85	100,00	7.500
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.000.000	32.927.600	99,78	100,00	72.400
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28.000.000	27.927.600	99,74	100,00	72.400

Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	526.691.700	523.367.799	93,37	100,00	3.323.901
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.973.000	99,46	100,00	27.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000	2.479.000	99,16	100,00	21.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.653.400	31.607.300	99,85	100,00	46.100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.985.300	51.946.491	99,93	100,00	38.809
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	34.800.000	31.915.000	91,71	100,00	2.885.000
Penyediaan Bahan/Material	25.000.000	24.865.070	99,46	100,00	134.930
Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	29.948.000	99,83	100,00	52.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	345.753.000	345.633.938	99,97	100,00	119.062
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.092.117.000	33.073.622.019	99,94	100,00	18.494.981
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.700.000	2.700.000	100,00	100,00	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.692.511.000	32.675.220.015	99,95	100,00	17.290.985
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	396.906.000	395.702.004	99,70	100,00	1.203.996
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	357.506.000	328.739.127	91,95	100,00	28.766.873
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	137.122.000	109.971.925	80,20	100,00	27.150.075
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220.384.000	218.767.202	99,27	100,00	1.616.798
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	21.793.020.300	21.703.330.503	99,59	100,00	89.689.797
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	20.501.704.300	20.421.879.322	99,61	100,00	79.824.978
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	19.493.000.000	19.417.701.900	99,61	100,00	75.298.100

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	1.008.704.300	1.004.177.422	99,55	100,00	4.526.878
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	213.930.000	213.915.511	99,99	100,00	14.489
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	213.930.000	213.915.511	99,99	100,00	14.489
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	358.320.000	353.914.342	98,77	100,00	4.405.658
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	358.320.000	353.914.342	98,77	100,00	4.405.658
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	59.950.000	58.650.300	97,83	100,00	1.299.700
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	59.950.000	58.650.300	97,83	100,00	1.299.700
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	369.800.000	366.829.270	99,20	100,00	2.970.730
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	7.500.000	7.409.500	98,79	100,00	90.500
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	352.300.000	349.419.770	99,18	100,00	2.880.230
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	-
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	289.316.000	288.141.758	99,59	100,00	1.174.242
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	272.816.000	271.686.758	99,59	100,00	1.129.242
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	16.500.000	16.455.000	99,73	100,00	45.000
JUMLAH	65.321.225.750	64.958.798.312	99,40	100,00	362.427.438

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2023. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2023 ini menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan realisasi 62,37 melebihi target 62,37 dengan capaian 92,77%
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator
 - Indikator 1 dengan realisasi 79,11 melebihi target 79,00 dengan capaian 100,14%, Indikator 2 dengan realisasi 70,21 berkurang dari target 82,60 dengan capaian 85,00%

Demikian laporan ini, sebagai informasi mengenai capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya tahun 2023. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kami untuk periode laporan 2023.